



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**DAMPAK OTONOMI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PAD
KOTA PADANG**


Oleh :

SYELVIA DASRIL
05 951 003

Mahasiswa Program Strata Satu (S - 1) Jurusan Ilmu Ekonomi

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebahagian Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

**PADANG
2009**

	No.Alumni Universitas	SYELVIA DASRIL	No.Alumni Fakultas
	a). Tempat/Tgl lahir: Pariaman, 13 Maret 1987 b). Nama Orang Tua: Dasril Darwis dan Yusniarti c). Fakultas: Ekonomi d). Jurusan: Ilmu Ekonomi e). No. Bp: 05 951 003 f). Tgl Lulus: 5 November 2009 g). Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h). IPK: 3,12 i). Lama Studi: 4 tahun 2 bulan j). Alamat Orang Tua: Jln Bhakti No. 99 Parupuk Tabing, Padang –Sumatera Barat		

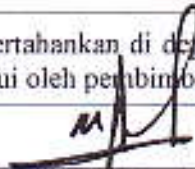
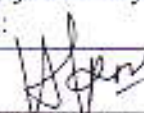
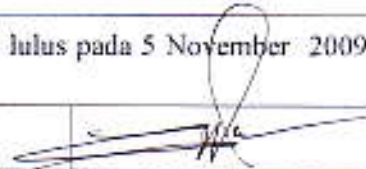
DAMPAK OTONOMI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PADANG

*Skripsi S1 Oleh: Syelvia Dasril
Pembimbing Drs. H. Masrizal, M. Soc. Sc*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh otonomi daerah terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang, untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, dan Kebijakan Keuangan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang, untuk menemukan langkah-langkah yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis ekonometrika. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari tahun 1998 sampai tahun 2007. Pegujian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil regresi yang dilakukan, diperoleh bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel penerimaan PAD dengan variabel tingkat PDRB, Jumlah Penduduk, dan Kebijakan Keuangan Daerah. Namun, secara keseluruhan bila dilihat dari hasil F-hitung, hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah signifikan. Berdasarkan hasil temuan di atas, penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah berupaya mendorong peningkatan PDRB, pemerataan Jumlah Penduduk serta membuat Kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga penerimaan PAD lebih besar peningkatannya di masa yang akan datang.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada 5 November 2009. Abstrak telah disetujui oleh pembimbing dan penguji :

Tanda Tangan			
Nama Terang	Drs. H. Masrizal, M.Sos.Sc (Pembimbing)	Dr. H. Hefrizal Handra (Pembahas I)	Drs. H. Zulkarnaini Ras (Pembahas II)

Mengetahui :
Ketua Jurusan : Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M. Ec, DEA, Ing
NIP. 130812952

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas / Universitas Andalas	
No. Alumni Fakultas:	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan *issue* yang baru sejak tahun 1999 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberi batasan pengertian otonomi daerah sebagai kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan pengalaman penyelenggaraan Otonomi Daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban daripada hak, maka dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 memberi kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Tujuan program otonomi daerah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing.

Menurut Sarundajang (1999:67), "kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup

kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan dibidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah". Disamping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Menurut Sarundajang (1999:67), "yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Sedangkan, yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah perwujudan dan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada Daerah, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah, serta antara daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Dengan adanya konsep otonomi daerah atau pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah terutama dalam mengurus rumah tangga daerah itu sendiri, tentunya akan mempengaruhi keberadaan keuangan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai modal dasar pembangunan. Besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri, artinya semakin kaya suatu daerah maka akan semakin besar PAD yang akan diterimanya, antar daerah tentunya berbeda tidak tertutup kemungkinan terdapatnya perbedaan besarnya PAD yang diterima oleh daerah sebelum adanya otonomi daerah dengan PAD yang diterima setelah otonomi daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan sesudah adanya otonomi daerah dibandingkan sebelum adanya otonomi daerah. Pertumbuhan Penerimaan PAD Kota Padang yang terbesar adalah pada tahun 2001 yaitu sebesar 70,55%, sedangkan pertumbuhan yang terkecil terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar minus 12,76%, hal ini disebabkan karena dampak dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Pertumbuhan rata-rata penerimaan PAD Kota Padang setiap tahunnya adalah sebesar 18,99%.
- b. Pertumbuhan PDRB selama tahun 1998/1999 sampai tahun 2007 mengalami peningkatan. Pertumbuhan PDRB tahun 1998 sebesar minus 7,54%, ini merupakan pertumbuhan PDRB yang terkecil sepanjang periode 1998/1999 s/d 2007. Sedangkan pertumbuhan terbesar adalah pada tahun 2007 yaitu sebesar 6,14%.
- c. Dilihat dari pertumbuhan beberapa sektor ekonomi, laju pertumbuhan rata-rata sektor ekonomi yang terbesar adalah sektor pertanian sebesar 4,47%. Kemudian diikuti oleh sektor perdagangan,

DAFTAR PUSTAKA

- Ad'lar, F. M. 2007. "Analisa Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar Pada Era Otonomi Daerah". Skripsi Sarjana FE UBH. Padang.
- Agustino Landiyanto, Erlangga. 2005. "Kinerja Keuangan Dan Strategi Pembangunan Kota Di Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Kota Surabaya". dalam <http://129.3.20.41/cps>. 15 Juni 2009. 13:20:10 WIB.
- BPS, Indikator Ekonomi Sumatera Barat, BPS dan Bappeda Propinsi Sumatera Barat, 1998-2007.
- BPS Kota Padang, Dalam Angka Tahun 2000
- BPS Kota Padang, Dalam Angka Tahun 2001
- BPS Kota Padang, Dalam Angka Tahun 2004/2005
- BPS Kota Padang, Dalam Angka Tahun 2007
- Candra Putra, Teguh. 2002. "Pengaruh Pendapatan Regional Terhadap PAD Kota Bukittinggi". Skripsi sarjana FE UA. Padang.
- Dewi, Elita. "Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah", dalam <http://digilib.usu.ac.id>. 15 Juni 2009. 16:10:30 WIB.
- Devas, Nick. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Fa'as, Dessyana. 2004. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Propinsi Sumatera Barat". Skripsi sarjana FE UA. Padang.
- Koncoro, Ph. D, Mudrajad. 2004. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Oktafia, Zulhafri. 2006. "Potensi Penerimaan PAD Kabupaten 50 Kota Dalam Menghadapi Otonomi Daerah". Sarjana FE UBH. Padang.
- Purnama, Hadi. "Prospek Keuangan Daerah Dalam Rangka Peningkatan PAD", dalam <http://publik.brawijaya.ac.id>. 17 Juli 2009. 15:10:20 WIB.
- Sarundajang, S.H.1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

